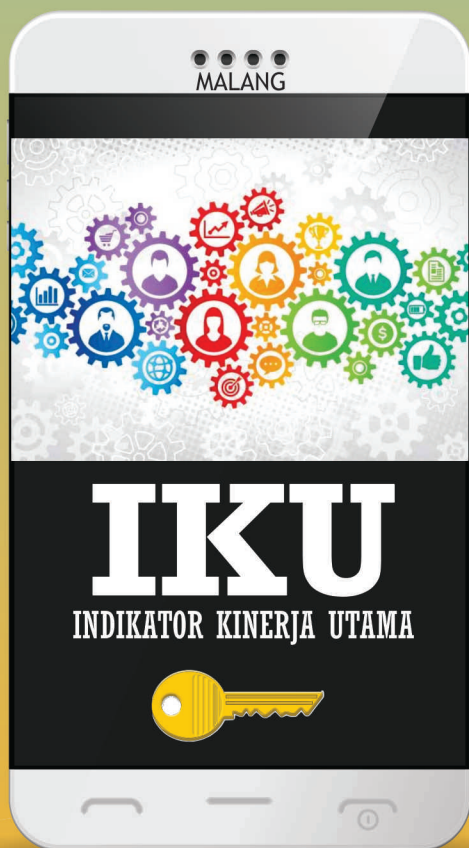


# PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG



PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 37 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA



**BAGIAN ORGANISASI**  
**Sekretariat Daerah Kota Malang**

Jl. Tugu No. 1 Malang Telp. 0341-365657  
email : [bag-organisasi@malangkota.go.id](mailto:bag-organisasi@malangkota.go.id)  
[organisasi.malangkota.go.id](http://organisasi.malangkota.go.id)

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 94 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa indikator kinerja utama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama perlu disesuaikan dengan perubahan indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
  8. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA.

Pasal I

Ketentuan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 - 12 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 31 - 12 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 95

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 94 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 MALANG NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.

**I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG**

<b>VISI : Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat</b>				
<b>MISI 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan</b>				
<b>KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI <b>dibagi</b> dengan jumlah penduduk berusia 7-12 th X100%  <b>Penjelasan :</b> siswa SD/MI yang dimaksud adalah seluruh siswa SD/MI tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)	- Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Data Individu Sekolah, Dapodik - Data penduduk usia 7-12 th

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	<p>Jumlah penduduk usia antara 7-12 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12 th</p> <p><b>Penjelasan :</b> Penduduk Kota Malang yang berusia 7-12 tahun yang sekolah di SD/MI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Individu Sekolah,Dapodik</li> <li>- Data penduduk usia 7-12 th</li> </ul>
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	<p>Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTs <b>dibagi</b> dengan jumlah penduduk berusia 13-15 th X100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> siswa SMP/MTs yang dimaksud adalah seluruh siswa SMP/MTs tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Individu Sekolah,Dapodik</li> <li>- Data penduduk usia 13-15 th</li> </ul>

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	<p>Jumlah penduduk usia antara 13-15 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 13-15 th</p> <p><b>Penjelasan :</b> Penduduk Kota Malang yang berusia 13-15 tahun yang sekolah di SMP/MTs</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Individu Sekolah, Dapodik</li> <li>- Data penduduk usia 13-15 th</li> </ul>
	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	<p>Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA <b>dibagi</b> dengan jumlah penduduk berusia 16-18 th X100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> siswa SMA/SMK/MA yang dimaksud adalah seluruh siswa SMA/SMK/MA tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Individu Sekolah, Dapodik</li> <li>- Data penduduk usia 16-18 th</li> </ul>

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	<p>Jumlah penduduk usia antara 16-18 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 th</p> <p><b>Penjelasan :</b> Penduduk Kota Malang yang berusia 16-18 tahun yang sekolah di SMA/SMK/MA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Individu Sekolah,Dapodik</li> <li>- Data penduduk usia 16-18 th</li> </ul>
	7. Angka Melek Huruf	<p>Jumlah penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis <b>dibagi</b> jumlah penduduk usia 15 th ke atas X 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar/Data penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> <li>- Data kependudukan</li> </ul>
	8. Angka Kelulusan	<p>Jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK) <b>dibagi</b> jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun ajaran berkenaan X 100%</p>	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data kelulusan setiap jenjang pendidikan</li> <li>- Data siswa tingkat tertinggi pada setiap jenjang pendidikan</li> </ul>



KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	9. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	<p>Jumlah anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia sekolah sampai dengan SMP/MTs dari keluarga pra sejahtera X 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan</li> </ul>	Dinas Pendidikan	- Data jumlah siswa SD/MI sampai dengan SMP/MTs yang berasal dari keluarga prasejahtera
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun <b>dibagi</b> jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama X 1.000	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kesehatan Kota Malang</li> <li>- Hasil monev pelayanan kesehatan</li> </ul>

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Banyaknya kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifa <b>dibagi</b> jumlah Ibu saat hamil, melahirkan dan nifas X 100.000 KH	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kesehatan Kota Malang</li> <li>- Hasil monev pelayanan kesehatan</li> </ul>
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	Jumlah tenaga medis X 1.000 <b>dibagi</b> jumlah penduduk Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kesehatan Kota Malang</li> <li>- Data kependudukan</li> </ul>
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	Jumlah posyandu X 1.000 <b>dibagi</b> jumlah balita	Dinas Kesehatan	Hasil monev kegiatan posyandu
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	Jumlah Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dibagi jumlah penduduk yang masuk kategori miskin X 100% <b>Penjelasan :</b> Penduduk miskin adalah penduduk yang memenuhi minimal 9 variabel dari 14 variabel miskin menurut standar kriteria BPS	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> <li>- Profil Kesehatan Kota Malang</li> <li>- Hasil monev pelayanan kesehatan</li> </ul>
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan Kota Malang

**MISI 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi sehat	<p>Jumlah koperasi sehat <b>dibagi</b> jumlah seluruh koperasi X 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> Koperasi sehat adalah koperasi yang mampu memenuhi aspek kesehatan koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 20/PER/M.KUKM/IX/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 yang meliputi : aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jatidiri koperasi.</p>	Dinas Koperasi dan UKM	Hasil kegiatan money dan pembinaan Koperasi

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	PDRB UKM <b>dibagi</b> total PDRB X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> </ul>
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB	PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran <b>dibagi</b> total PDRB X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> </ul>
	2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	PDRB sektor industri pengolahan <b>dibagi</b> total PDRB X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Dinas Perindustria dan Perdagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> </ul>
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah angkatan kerja yang menganggur (tidak bekerja) dibagi jumlah Angkatan Kerja keseluruhan (usia 15 – 59 tahun) x 100%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil monev ketenagakerjaan</li> <li>- Profil Kota Malang</li> </ul>

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	<p>Jumlah Angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas X 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> Angkatan kerja 15 tahun ke atas adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja</p>	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<p>- Hasil monev ketenagakerjaan</p> <p>- Profil Kota Malang</p>
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	<p>Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n dikurangi Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n-1 dibagi Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n-1</p> <p><b>Penjelasan :</b> Nilai penanaman modal dan investasi daerah (milyar rupiah) pada tahun berkenaan</p>	Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal	Hasil koordinasi dengan BKPM
Meningkatnya ketersediaan pangan ( <i>food availability</i> )	Ketersediaan pangan ( <i>food availability</i> )	<p>Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun (kg) <b>dibagi</b> jumlah penduduk X 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> Kriteria pangan meliputi : padi, tebu, ikan, daging dan telur</p>	<p>- Dinas Pertanian</p> <p>- Kantor Ketahanan Pangan</p>	Laporan Hasil Kegiatan monev produk pangan Daerah

**MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial**

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	<p>Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin <b>dibagi</b> jumlah penduduk X 100%</p> <p>Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n-1 dikurangi Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n dibagi Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n-1 x 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> Penduduk miskin adalah penduduk yang memenuhi minimal 9 variabel dari 14 variabel miskin menurut standar kriteria BPS</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Monev Kemiskinan</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> </ul>

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	<p>Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yangmendapatkan penanganandibagi jumlah seluruh penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensialX 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> Yang dimaksud mendapatkan penanganan adalahyang telah diberikan bantuan/pelatihan</p>	Dinas Sosial	Laporan Hasil Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	<p>Jumlah korban bencana yang tertangani <b>dibagi</b> jumlah seluruh korban bencanaX 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> kriteria tertangani adalah pada korban bencana diberikan bantuan dalam bentuk bantuan relokasi sementara, bantuan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, bantuan bimbingan konseling, rohani dan moral.</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Angka harapan hidup perempuan ditambah angka melek huruf perempuan dan pendapatan perempuan dibagi 3 (tiga)</p> <p>Penjelasan : Hampir sama dengan IPM namun pada penghitungan Indeks Pembangunan Gender, komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki.</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka</li> <li>- Data Badan Pusat Statistik</li> </ul>
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>Indeks keterwakilan perempuan diparlemen ditambah indeks pengambilan keputusan ditambah pendapatan perkapita perempuan dibagi 3 (tiga)</p> <p>Penjelasan : Merupakan indeks komposit dari Tiga komponen penyusun yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti.	Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama x 100%  Penjelasan : Ditindaklanjuti adalah dilaksanakan sesuai dengan bunyi kesepakatan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Forum Komunikasi Antar Umat Beragama	- Hasil musyawarah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang
	2. Persentase penurunan kerusakan bermotif SARA	Jumlah kerusakan bermotif SARA tahun n-1 dikurangi jumlah kerusakan tahun n dibagi jumlah kerusakan bermotif SARA tahun n-1 x100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Kerusakan SARA pada Kepolisian
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	Jumlah kriminalitas tahun n-1 dikurangi jumlah kriminalitas tahun n dibagi jumlah kriminalitas tahun n-1 x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data tindak kriminalitas pada Kepolisian
	2. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	Jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n-1 dikurangi jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n dibagi jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n-1 x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Pelanggaran Perda

**MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan**

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	Jumlah seluruh luasan kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan</li> </ul>	Hasil monev pencapaian SPM bidang Perumahan
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	<p>Jumlah kumulatifpanjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang <b>dibagi</b> jumlah kumulatifpanjang jalan X 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan <math>\leq 6\%</math>), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	Laporan hasil kegiatan pengawasan dan pemeliharaan jalan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	3. Persentase layanan air bersih	Jumlah KK yang mendapat pelayanan air bersih <b>dibagi</b> jumlah seluruh KK X 100%	PDAM	Data KK pengguna air bersih
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	Luasan ruang terbuka hijau <b>dibagi</b> luasan wilayah X 100%	- Dinas Kebersihan dan Pertamanan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data/profil ruang terbuka hijau Kota Malang
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	Jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani dibagi jumlah seluruh pelanggaran tata ruang X 100% Penjelasan : Pelanggaran tata ruang yang tertangani yaitu pelanggaran yang sudah ditindak mulai dari surat peringatan sampai dengan proses penyidikan	- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan - Satpol PP	Hasil kegiatan pembinaan OKP
	3. % luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	Jumlah pemanfaatan ruang yang telah sesuai dg peruntukannya dibagi jumlah seluruh wilayah yang telah dimanfaatkan x 100%  Penjelasan : Kriteria sesuai peruntukannya adalah wilayah tersebut telah digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**MISI 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi	Inspektorat	Laporan hasil penetapan WBK oleh Kementerian PAN dan RB
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Malang	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Inspektorat - Bagian Organisasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB
	3. Opini BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD)	- Inspektorat - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan hasil audit LKD oleh BPK
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bagian Organisasi	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## II. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

### 1. SEKRETARIAT DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan <b>dibagi</b> jumlah seluruh rencana aksi X 100% Penjelasan : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) ada 4 area perubahan meliputi Sumber Daya Aparatur, Penataan Peraturan Perundangan, Pengawasan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 13 Program.	Bagian Organisasi	Hasil Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kualitas Organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Jumlah SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah diterapkan <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan X 100% <b>Penjelasan :</b> Kriteria diterapkan adalah telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik unit kerja maupun pelaksana serta telah dilakukan evaluasi minimal satu kali dalam setahun oleh 102 unit kerja/SKPD	Bagian Organisasi	Hasil Monev penyelenggaraan pelayanan publik

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	a. Cakupan modin, guru ngaji, dan guru sekolah minggu penerima tunjangan	Jumlah modin, guru ngaji, dan guru sekolah minggu penerima tunjangan <b>dibagi</b> jumlah seluruh modin yang terdaftar X 100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Daftar penerima tunjangan
	b. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan	Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan tempat ibadah X 100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Daftar tempat ibadah penerima bantuan perbaikan
Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah	a. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	Jumlah Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan Peraturan Daerah yang tercantum dalam program legislasi daerah X 100%	Bagian Hukum	Program Legislasi Daerah
	b. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang telah dipublikasikan pada masyarakat dan aparatur pemerintah <b>dibagi</b> jumlah seluruh peraturan perundang-undangan daerah X 100%	Bagian Hukum	Hasil kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan daerah

## 2. SEKRETARIAT DPRD

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya pelayanan prima Sekretariat DPRD Kota Malang sebagai fasilitator dan mediator pada kegiatan DPRD Kota Malang</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan fasilitas dan Pelayanan Umum, Keuangan, Risalah dan Kehumasan Kepada DPRD Kota Malang</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Kegiatan	Survey Kepuasan Pimpinan dan Anggota DRDP	Bagian Umum	Hasil Survey Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD
Terwujudnya Peningkatan Kinerja DPRD Kota Malang	Persentase kegiatan reses Pimpinan dan anggota DPRD yang dipublikasi	Jumlah kegiatan reses Pimpinan dan anggota DPRD yang dipublikasi dibagi seluruh kegiatan reses x 100% Penjelasan : Dipublikasikan adalah pemberitaan kegiatan reses pada media cetak atau media elektronik	Bagian Humas	Laporan hasil reses

### 3. INSPEKTORAT

<b>VISI</b>	: Terwujudnya Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima
<b>MISI</b>	: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Akuntabel

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang Berkualitas	a. Persentase SKPD yang menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Standar Pelayanan SKPD yang sesuai ketentuan dibagi Jumlah seluruh Standar Pelayanan SKPD yang dievaluasi x 100% Penjelasan : - Penyelenggaraan Standar Pelayanan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 dan PP No. 96 Tahun 2015 serta Permenpan & RB No. 15 Tahun 2015 - Pengukuran dilakukan menggunakan Surat Keputusan Inspektur No. 800/03/35.73.401/2014 tentang kuisisioner Pelayanan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Inspektur Pembantu & Sekretaris	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
	b. Persentase SKPD yang memadai	Jumlah SPIP SKPD yang memadai dibagi jumlah seluruh SPIP SKPD yang dievaluasi x 100%	Inspektur Pembantu	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)



KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Penjelasan : - SPIP SKPD yang memadai adalah SPIP yang sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Malang No. 39 Tahun 2010 - Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Malang (Daftar Uji SPIP)		
	c. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	Jumlah SKPD yg nilai SAKIP nya B dibagi jumlah seluruh SAKIP SKPD yang dievaluasi X 100%	Inspektur Pembantu	Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP
	d. Persentase SKPD Yang Menindak lanjuti Temuan Pengawasan	$\frac{\text{Jml SKPD yang menindaklanjuti temuan Inspektorat}}{\text{Jml SKPD Yang Diperiksa}} \times 100\%$	Inspektur Pembantu & Sekretaris	Buku Laporan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)
	e. Persentase Penurunan Jumlah Temuan Internal dan Eksternal	$\frac{(\text{Jml temuan audit int. tahun } n-1) - (\text{Jml temuan audit int. tahun } n)}{\text{jumlah temuan int. tahun } n-1} \times 100\%$	Inspektur Pembantu	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
		$\frac{(\text{Jml temuan audit eks. tahun } n-1) - (\text{Jml temuan audit eks. tahun } n)}{\text{jumlah temuan eks. tahun } n-1} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	f. Persentase Kasus Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pengaduan Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kasus Pengaduan Yang Masuk}} \times 100\%$	Inspektur Pembantu	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus
	g. Persentase Temuan BPK RI Yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jml. temuan BPK Seluruhnya}} \times 100\%$	Sekretaris	Buku Pemantauan Penyelesaian TLHP BPK-RI

#### 4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN HANDAL</b>
<b>MISI</b>	<b>: MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKUNTABEL, KONSISTEN DAN IMPLEMENTATIF</b>

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar	Persentase SKPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	Jumlah SKPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras dibagi Jumlah SKPD dikali 100% <b>Penjelasan :</b> - Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi Renstra, Renja/RKT/RKA	Bidang Pendataan dan Evaluasi	Laporan evaluasi LAKIP Inspektorat

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		- kondisi baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan hasil evaluasi LAKIP oleh inspektorat minimal B		
Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik	Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik <b>dibagi</b> Jumlah SKPD <b>dikali</b> 100% <b>Penjelasan :</b> yang dimaksud dengan dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik adalah dokumen Renstra dan Renja/RKT yang : - berorientasi pada <i>outcome</i> - indikator kinerjanya bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, terkait langsung pada hasil dan berbatas waktu - target yang ditetapkan rasional, optimis dan memenuhi asas kepatutan	Bidang Pendataan dan Evaluasi	Laporan Hasil Evaluasi Renstra dan Renja/RKT SKPD
	b. Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT <b>dibagi</b> Jumlah SKPD <b>dikali</b> 100%	Bidang Pendataan dan Evaluasi	Hasil evaluasi RKA SKPD
	c. Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	Jumlah indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi <b>dibagi</b> Jumlah indikator sasaran pada RKPD <b>dikali</b> 100%	Bidang Pendataan dan Evaluasi	Laporan Hasil Evaluasi RKPD

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah	Persentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	Luas wilayah yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi <b>dibagi</b> luas wilayah Kota Malang <b>dikali</b> 100%	Bidang Tata Kota	Laporan Hasil Monitoring Pemanfaatan Ruang Wilayah

## 5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional Guna Mendukung Pelayanan Publik Yang Prima</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penjelasan : Nilai Survei Kepuasan PNS Pemkot Malang dalam menerima pelayanan	Sekretariat	Kuesioner SKM
Mewujudkan penataan SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	a. Persentase Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	$\frac{\sum \text{Penempatan Pejabat Struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya}}{\sum \text{Pejabat Struktural yang ada}} \times 100\%$	Bidang Mutasi	Tim Baperjakat

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	b. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	$\frac{\sum \text{ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya}}{\sum \text{seluruh ASN}} \times 100\%$ Penjelasan : ASN meliputi jumlah JFU	Bidang Mutasi dan Bidang Formasi dan Informasi	Database Simpeg
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	a. Persentase Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat PIM (II, III dan IV)	$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang memiliki sertifikat PIM}}{\sum \text{pejabat struktural yang ada}} \times 100\%$	Bidang Diklat	Rekapitulasi data pejabat Ess. Yang telah memiliki sertifikat Diklat PIM berdasarkan data simpeg BKD
	b. Persentase ASN yang telah mengikuti Pelatihan Teknis dan Fungsional	$\frac{\sum \text{ASN yang telah mengikuti pelatihan Teknis dan Diklat Fungsional}}{\sum \text{Seluruh ASN}} \times 100\%$	Bidang Diklat	Hasil Penyelenggaraan /Pengiriman Diklat Teknis dan Fungsional

## 6. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib dan Normatif</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Persentase penyajian laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual	Jumlah SKPD yang dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual <b>dibagi</b> jumlah seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Malang x 100%	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Laporan Keuangan SKPD
	Nilai Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat
	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang	Penetapan APBD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 paling lambat 30 Nopember tahun anggaran sebelumnya	Bidang Anggaran	Nota Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat	Jumlah bidang lahan aset daerah yang sudah bersertifikat <b>dibagi</b> jumlah seluruh bidang aset daerah x 100%	Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	Neraca Pemerintah Daerah

## 7. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk serta Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Produktivitas, Kemandirian dan Kesejahteraan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat miskin	a. Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelatihan keterampilan	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelatihan keterampilan <b>dibagi</b> jumlah masyarakat miskin x 100%	Bidang Pembangunan Masyarakat	- Data pelatihan keterampilan - BPS

<b>MISI 2</b>	<b>: Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
---------------	--

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	a. Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	Jumlah kasus KDRT yang ditangani <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan kasus KDRT x 100%	Bidang PP dan PA	Rekapitulasi hasil penanganan kasus KDRT
	b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu <b>dibagi</b> jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu dikali 100%	Bidang PP dan PA	Laporan Capaian SPM

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	c. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/ PKT di RS	Jumlah korban KDRT yang mendapat pelayanan kesehatan <b>dibagi</b> jumlah korban KDRT yang datang ke Puskesmas dikali 100%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan pada perempuan dan anak korban kekerasan

**MISI 3 : Meningkatkan Pengendalian Penduduk Menuju Kualitas Keluarga Sehat dan Sejahtera**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	a. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif	Jumlah peserta KB aktif <b>dibagi</b> jumlah PUS x 100%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Hasil monev pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana
	b. Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak <b>dibagi</b> jumlah keluarga	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Hasil monev kegiatan pemberdayaan keluarga



## 8. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Masyarakat Kota Malang Yang Tentram, Berwawasan Kebangsaan dan Demokratis</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan ketentraman dengan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	a. Persentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi	Jumlah konflik (antar kelompok pemuda pelajar/mahasiswa, dan antar kampung) yang dimediasi dalam setahun dibagi jumlah seluruh konflik (antar kelompok pemuda pelajar/mahasiswa, dan antar kampung) yang terjadi X100%	Bidang Kewaspadaan Daerah	Laporan Bidang Kewaspadaan Daerah
	b. Persentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan	Jumlah kerusuhan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh kerusuhan X 100%	Bidang Kewaspadaan Daerah	Laporan Bidang Kewaspadaan Daerah
	c. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ada x 100%	Bidang Integrasi	Laporan Bidang Integrasi
Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	a. Persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	Jumlah anggota DPRD perempuan dibagi jumlah seluruh anggota DPRD X 100%	Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
	b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif di bagi total pemilih X 100%	Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	c. Persentase partisipasi pemilih dalam Pilpres	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dibagi total pemilih X 100%	Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
	d. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilukada	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah di bagi total pemilih X 100%	Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga

## 9. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pengelolaan, Pelestarian dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kota Malang</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya penerapan peraturan dan kebijakan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik.	Prosentase perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang memiliki Ijin Lingkungan.	Jumlah perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang memiliki Ijin Lingkungan <b>dibagi</b> jumlah perusahaan dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Ijin Lingkungan X 100 %.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran	Data Perusahaan yang memiliki ijin

**MISI 2 : Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya upaya konservasi sumber daya alam guna menjaga keseimbangan alam dengan merehabilitasi cadangan sumber daya alam.	a. Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya dibagi jumlah seluruh luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa x 100%.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran	Data Luasan Lahan produksi biomassa
	b. Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya.	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya <b>dibagi</b> jumlah seluruh sumber air X 100%.	BLH	BLH

**MISI 3 : Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.	a. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti <b>dibagi</b> Jumlah seluruh pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masuk X 100%.	BLH	BLH
	b. Persentase jumlah partisipasi dan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Jumlah kelurahan yang masuk dalam kriteria kelurahan yang bersih dan lestari (BERSERI) <b>dibagi</b> Jumlah kelurahan di Kota Malang X 100%.	BLH	BLH

**MISI 4 : Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Menurunkan potensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	a. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air <b>dibagi</b> jumlah usaha/kegiatan yang diawasi telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air X 100%.	BLH	BLH

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	b. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencemaran udara <b>dibagi</b> Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari X 100%.	BLH	BLH
	c. Persentase jumlah titik pantau udara ambient dalam rangka pencegahan pencemaran udara.	Jumlah titik pantau udara ambient yang dipantau <b>dibagi</b> Jumlah total titik pantau udara ambient X 100%.	BLH	BLH
	d. Persentase jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor dalam rangka pencegahan pencemaran udara.	Jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi standar uji emisi <b>dibagi</b> Jumlah total kendaraan bermotor yang diuji.	BLH	BLH
	e. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun <b>dibagi</b> Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dipantau x 100%.	BLH	BLH

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	f. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dokumen Kajian Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL) dan Izin Lingkungan.	Jumlah kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan <b>dibagi</b> Jumlah total usaha dan/atau kegiatan X 100%.	BLH	BLH

#### 10. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat dan Akuntabel</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan yang adil, terukur, berkualitas dan Akuntabel</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang adil, terukur, berkualitas dan akuntabel	a. Persentase IMB yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase IG yang diselesaikan tepat waktu	$I_{tw}$ = izin tepat waktu $I_m$ = izin masuk $\% = \frac{\sum I_{tw}}{\sum I_m} \times 100 \%$	Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum, Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian, dan Bidang Pelayanan Perizinan Persosbud	Data SIM Perizinan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	c. Persentase Reklame permanen yang diselesaikan tepat waktu			
	d. Persentase SIUP yang diselesaikan tepat waktu			
	e. Persentase TDUP yang diselesaikan tepat waktu			
	f. Rata-rata waktu penyelesaian IMB	$\text{rata2 wkt} = \frac{\sum \text{wkt penyelesaian izin}}{\sum \text{izin yg diselesaikan}}$	Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum	
	g. Rata-rata waktu penyelesaian IG			
	h. Persentase Penurunan Pengaduan	$\% = \frac{P_{n-1} - P_n}{P_{n-1}}$	Sub Bagian Umum	Pengaduan Masy yang masuk
	i. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap IMB - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap IG	Nilai SKM	Sub Bagian Sungram	Survey Kepuasan Masyarakat

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Usaha Angkutan</li> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Reklame Permanen</li> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Reklame Insidentil</li> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Trayek</li> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi</li> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Penyelenggaraan Tontonan</li> </ul>			



<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Usaha Perdagangan</li> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata</li> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Usaha Perindustrian</li> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Gedung Gajayanan dan Wisma Tamu</li> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Izin Operasional Jasa Medik Veteriner</li> </ul>			

## 11. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Kota Malang yang tanggap, tangkas, dan tangguh menghadapi bencana</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Melindungi masyarakat Kota Malang dari risiko bencana melalui mitigasi bencana</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Peningkatan kerjasama lintas seKtor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiap siagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah bencana tahun } (x) - \text{Jumlah bencana tahun } (x - 1)}{\text{Jumlah bencana tahun } (x - 1)} \times 100\%$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Hasil survey

<b>MISI 2</b>	<b>: Mengembangkan management kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana</b>
---------------	--

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Rata – rata waktu tanggap ( <i>respond time</i> )bencana (Target < 1 jam)	$\frac{\text{Jumlah respond time seluruh kejadian bencana}}{\text{Jumlah kejadian bencana}}$	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Laporan pelaksanaan kegiatan

**MISI 3 : Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik	a. Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana (Target = 25%)	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang rusak terkena bencana}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan pelaksanaan kegiatan
	b. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana (Target = 80%)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sekretariat	Survey / Questionnaire

## 12. DINAS PENDIDIKAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Insan Kota Malang yang Cerdas, Bermartabat dan Mampu Bersaing di Era Global</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Mewujudkan Pendidikan Kota Malang Yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Masyarakat</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	a. Angka Lulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa lulus}}{\text{Jumlah siswa mengikuti ujian nasional}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik
	b. Angka partisipasi murni - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa usia sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik
	c. Angka partisipasi kasar - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik
	d. Angka putus sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah}}{\text{Jumlah siswa}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	e. Angka melanjutkan - Dari SD/MI ke SMP/MTs - Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa baru yang diterima}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik
	f. Persentase sekolah dengan Kondisi bangunan kelas baik - SD/MI - SMP/MTS - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah sekolah dengan kondisi bangunan kelas baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah}} \times 100\%$	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah, Dapodik
	g. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs}}{\text{Jumlah seluruh anak usia sekolah sampai dengan SMP/MTs}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Kriteria pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan</p>	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data penerima BOSDA

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	a. Rasio guru / murid per kelas - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah Guru per kelas}}{\text{Jumlah Murid}}$	Bidang SD & PKLK ; Bidang SMP, SMA & SMK ; Bidang Fungsional Kependidikan	Data Individu Sekolah, Dapodik
	b. Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	$\frac{\text{Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik}}{\text{jumlah seluruh guru}} \times 100\%$	Bidang Fungsional Kependidikan	Data Individu Sekolah, Dapodik
Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta pendidikan luar sekolah	a. APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah peserta PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 6 tahun}} \times 100\%$	Bidang PNFI	Data Individu Sekolah, Dapodik
	b. Angka Melek Huruf	$\frac{100\% - (\text{Jumlah Buta Aksara})}{(\text{Jumlah Penduduk Usia 15-45 Thn})} \times 100\%$	Bidang PNFI	BPS, Data KF
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai SKM	Semua Bidang dan Sekretariat	Nilai SKM

### 13. DINAS KESEHATAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Malang</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu	a. Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah pemakaian obat dan perbekalan kesehatan setahun ditambah sisa obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia dibagi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam setahun x 100%	Laporan tribulan kesetersediaan obat	Bidang Farmakmin
	b. Terpenuhinya ketersediaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia dibagi jumlah alat kesehatan sesuai kebutuhan X 100 %	Laporan semester inventaris alat kesehatan	Bidang Farmakmin
Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 <b>dibagi</b> jumlah seluruh masyarakat miskin X 100%	Laporan Puskesmas, Laporan Dinas Kesehatan, Laporan Dinas Sosial	Bidang Binkesmas
Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit	a. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 <b>dibagi</b> jumlah sasaran ibu hamil X 100 %	LB3, SIRS, Kohort Ibu, PWS - KIA	Bidang Pelayanan Kesehatan
	b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive <b>dibagi</b> jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan X 100 %	LB3, SIRS, Laporan AMP	Bidang Pelayanan Kesehatan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan <b>dibagi</b> jumlah seluruh sasaran ibu bersalin X 100 %	LB3, SIRS	Bidang Pelayanan Kesehatan
	d. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	Jumlah Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar <b>dibagi</b> jumlah seluruh ibu nifas X 100 %	LB3, SIRS, Kohort LB 3 Ibu, PWS - KIA	Bidang Pelayanan Kesehatan
	e. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani <b>dibagi</b> jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada X 100 %	LB3, SIRS, Laporan AMP	Bidang Pelayanan Kesehatan
	f. Cakupan kunjungan bayi	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar <b>dibagi</b> jumlah seluruh bayi yang lahir hidup X 100 %	Kohort bayi, SIRS dan klinik	Bidang Pelayanan Kesehatan
	g. Cakupan pelayanan anak balita	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali <b>dibagi</b> jumlah seluruh anak balita X 100 %	Kohort Balita, Laporan rutin SKDN, Buku KIA, KMS, Pencatatan pada Pos PAUD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	h. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk yang dirawat <b>dibagi</b> jumlah balita gizi buruk yang ditemukan X 100 %	Laporan KLB Gizi buruk Puskesmas dan RS, LB 3 SIMPUS, SIRS-W1	Bidang Binkesmas



<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Menurunnya angka kesakitan , kecacatan dan kematian akibat penyakit	a. Penderita DBD yang ditangani	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP <b>dibagi</b> jumlah penderita DBD yang ditemukan X 100 %	SIMPUS, SIRS	Bidang P2PL
	b. Penderita HIV/AIDS yang ditangani	Jumlah penderita HIV/AIDS ditangani sesuai SOP <b>dibagi</b> jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan x 100%	SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)	Bidang P2PL
	c. Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa/ kelurahan UCI <b>dibagi</b> jumlah desa/ kelurahan X 100 %	SIMPUS, SIRS dan klinik	Bidang P2PL
	d. Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB di Kelurahan yang ditangani < 24 jam <b>dibagi</b> jumlah KLB di kelurahan yang terjadi X 100 %	Laporan KLB 24 jam (W1), Laporan Hasil Penyelidikan dan penanggulangan KLB	Bidang P2PL
Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat	Kelurahan mengikuti program kota sehat	Jumlah kelurahan yang mengikuti program Kota Sehat	Profil Kesehatan Kota Malang	Bidang P2PL
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan	a. Rasio Posyandu per satuan Balita	Jumlah Posyandu X 1000 <b>dibagi</b> Jumlah Balita	Profil Kesehatan Kota Malang, Laporan Kinerja Posyandu	Bidang Binkesmas
	b. Cakupan kelurahan siaga aktif	Jumlah kelurahan siaga yang aktif <b>dibagi</b> jumlah kelurahan siaga yang dibentuk X 100 %	Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas	Bidang Binkesmas

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terpantaunya mutu, keamanan pangan, sarana peredaran obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan kosmetika	Cakupan sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat/standar	Jumlah sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat dibagi jumlah sarana obat x 100%	Laporan hasil pengawasan/monitoring sarana obat	Bidang Farmakmin
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu	a. Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas HIV Counseling and testing (HCT) dan Infeksi menular seksual (IMS)	Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas HIV Counseling and testing (HCT) dan Infeksi menular seksual (IMS)	Bidang P2PL	Profil kesehatan Kota Malang, Data Kependudukan
	b. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu X 1.000 <b>dibagi</b> jumlah penduduk	Bidang Pelayanan Kesehatan	Profil kesehatan Kota Malang, Data Kependudukan
	c. Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	Jumlah dokter puskesmas X 1.000 <b>dibagi</b> jumlah penduduk	Bidang Pelayanan Kesehatan	Profil kesehatan Kota Malang, Data Kependudukan
	d. Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	Jumlah tenaga paramedis X 1.000 <b>dibagi</b> jumlah penduduk	Bidang Pelayanan Kesehatan	Profil kesehatan Kota Malang, Data Kependudukan

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	e. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 <b>dibagi</b> jumlah seluruh masyarakat miskin X 100%	Bidang Binkesmas	Laporan Puskesmas, Laporan Dinas Kesehatan, Laporan Dinas Sosial
	f. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 <b>dibagi</b> jumlah seluruh masyarakat miskin X 100%	Bidang Binkesmas	Laporan Rumah Sakit, Laporan Dinas Kesehatan
	g. Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2008 atau terakreditasi	Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2008 atau terakreditasi	Bidang Pelayanan Kesehatan	Profil Kesehatan Kota Malang
	h. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/ Kota	Pelayanan gawat darurat level 1 <b>dibagi</b> jumlah RS Kab/ Kota x 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	Laporan Rumah Sakit, Laporan Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat	Hasil pengukuran SKM UPT Dinas Kesehatan
Menurunnya angka kematian ibu dan anak	a. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 <b>dibagi</b> jumlah sasaran ibu hamil X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	LB3, SIRS, Kohort Ibu, PWS - KIA
	b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive <b>dibagi</b> jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	LB3, SIRS, Laporan AMP

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan <b>dibagi</b> jumlah seluruh sasaran ibu bersalin X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	LB3, SIRS
	d. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	Jumlah Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar <b>dibagi</b> jumlah seluruh ibu nifas X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	LB3, SIRS, Kohort LB 3 Ibu, PWS - KIA
	e. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani <b>dibagi</b> jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	LB3, SIRS, Laporan AMP
	f. Cakupan kunjungan bayi	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar <b>dibagi</b> jumlah seluruh bayi yang lahir hidup X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	Kohort bayi, SIRS dan klinik
	g. Cakupan pelayanan anak balita	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali <b>dibagi</b> jumlah seluruh anak balita X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	Kohort Balita, Laporan rutin SKDN, Buku KIA, KMS, Pencatatan pada Pos PAUD
	h. Cakupan peserta KB aktif	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu <b>di bagi</b> seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama X 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan	SIMPUS, SIRS, Formulir 2 KB

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	a. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	Jumlah balita usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin yang mendapat MPASI <b>dibagi</b> jumlah seluruh balita usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin X 100%	Bidang Binkesmas	Laporan khusus MP-ASI, R-1 Gizi, LB3 SIMPUS
	b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk yang dirawat <b>dibagi</b> jumlah balita gizi buruk yang ditemukan X 100 %	Bidang Binkesmas	Laporan KLB Gizi buruk Puskesmas dan RS, LB 3 SIMPUS, SIRS-W1
Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan <b>dibagi</b> jumlah penduduk usia < 15 tahun X 100.000	Bidang P2PL	Form pelacakan FP.1, Laporan W2
	a. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun			
	b. Penemuan penderita pneumonia balita	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani <b>dibagi</b> jumlah perkiraan penderita pneumonia X 100 %	Bidang P2PL	Laporan bulanan puskesmas, medical record RS/ RS Swasta
	c. Penemuan pasien Baru TB – BTA positif	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati <b>dibagi</b> jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif X 100 %	Bidang P2PL	Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11
d. Penderita DBD yang ditangani	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP <b>dibagi</b> jumlah penderita DBD yang ditemukan X 100 %	Bidang P2PL	SIMPUS, SIRS	

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	e. Penemuan penderita Diare	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader <b>dibagi</b> jumlah perkiraan penderita diare X 100 %	Bidang P2PL	Catatan kader , LB 1/ Laporan bulanan / klinik
	f. Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa/ kelurahan UCI <b>dibagi</b> jumlah desa/ kelurahan X 100 %	Bidang P2PL	SIMPUS, SIRS dan klinik
	g. Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB di Kelurahan yang ditangani < 24 jam <b>dibagi</b> jumlah KLB di kelurahan yang terjadi X 100 %	Bidang P2PL	Laporan KLB 24 jam (W1), Laporan Hasil Penyelidikan dan penanggulangan KLB
Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat	Kelurahan mengikuti program kota sehat	Jumlah kelurahan yang mengikuti program Kota Sehat <b>dibagi</b> jumlah kelurahan X 100 %	Bidang P2PL	Profil Kesehatan Kota Malang
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan	a. Rasio Posyandu per satuan Balita	Jumlah Posyandu X 1000 <b>dibagi</b> Jumlah Balita	Bidang Binkesmas	Profil Kesehatan Kota Malang, Laporan Kinerja Posyandu
	b. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya <b>dibagi</b> jumlah murid SD dan setingkat x 100 %	Bidang Binkesmas	Laporan kegiatan UKS
	c. Cakupan desa siaga aktif	Jumlah desa siaga yang aktif <b>dibagi</b> jumlah desa siaga yang dibentuk X 100 %	Bidang Binkesmas	Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terwujudnya ketersediaan obat dan sediaan farmasi yang bermutu dan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian	Ketersediaan obat untuk sarana milik Pemerintah Kota Malang	Jumlah pemakaian obat setahun ditambah sisa obat yang tersedia <b>dibagi</b> kebutuhan obat dalam setahun X 100 %	Bidang Farmakmin	Laporan tribulan kesetersediaan obat
Terpantaunya mutu, keamanan pangan, sarana peredaran obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan kosmetika	a. Cakupan sampel pangan yang diambil dari peredaran	Jumlah sampel yang diuji laboratorium <b>dibagi</b> jumlah sampel pangan yang diambil secara acak dari peredaran X 100 %	Bidang Farmakmin	Laporan hasil pengujian sampel makanan dan minuman
	b. Cakupan sarana obat yang diawasi	Jumlah sarana obat yang diawasi <b>dibagi</b> jumlah sarana obat x 100 %	Bidang Farmakmin	Laporan kegiatan pengawasan tahunan, Profil Kesehatan Kota Malang

#### 14. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya pelayanan pembinaan kepemudaan dan olahraga yang berkualitas</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepemudaan dan olahraga yang intensif, produktif dan inovatif</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif	a. Persentase pemuda binaan yang berwirausaha	Jumlah pemuda binaan yang berwirausaha dibagi jumlah seluruh pemuda binaan x 100%	Bidang kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga	Data Pemuda Binaan
	b. Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	jumlah pemuda peserta kegiatan dibagi jumlah seluruh pemuda kota malang x 100%	Bidang Pemberdayaan Pemuda	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
	c. Persentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi	jumlah pemuda kota malang yang lolos seleksi dibagi jumlah peserta seleksi tingkat provinsi asal Kota Malang x 100%	Bidang Pemberdayaan Pemuda	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan	a. Peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi	peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi	Bidang Pengembangan Olahraga	Laporan pelaksanaan kegiatan
	b. Persentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi	Jumlah perolehan medali emas tahun n dikurangi jumlah perolehan tahun n-1 dibagi jumlah perolehan medali emas tahun n-1 x 100%	Bidang Pengembangan Olahraga	Laporan pelaksanaan kegiatan



<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	c. Persentase cabor berprestasi tingkat provinsi	jumlah cabor yang berprestasi pada tingkat propinsi dibagi jumlah cabor yang mengikuti kejuaraan pada tingkat propinsi x 100% Penjelasan : Cabor yang berprestasi adalah Cabang Olahraga yang memperoleh Medali	Bidang Pengembangan Olahraga	Laporan pelaksanaan kegiatan

#### **15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Prima, Adil, Terukur, Transparan, Berbudaya dan Bersih</b>
<b>MISI</b>	<b>: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	a. Persentase Keluarga yang memiliki KK terupdate	Jumlah Kartu Keluarga ( KK ) yang diterbitkan pada tahun (x) di bagi jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x) di kalikan 100% .	Bidang Kependudukan	Database Kependudukan
	b. Persentase penduduk yang ber KTP	Jumlah KTP yang diterbitkan pada tahun (x) di bagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun (x) di kalikan 100 %	Bidang Kependudukan	Database Kependudukan

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
		Penjelasan : Tertanggal 31 Desember 2014 KTP Non Elektronik/KTP SIAK sudah tidak berlaku sehingga yang akan dihitung IKU nya adalah KTP Elektronik		
	c. Persentase penduduk yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun (x) di bagi jumlah lahir hidup pada tahun (x) di kalikan 100%	Bidang Pencatatan Sipil	Database Kependudukan
	d. Persentase penduduk yang meninggal yang diterbitkan Kutipan Akta Kematian	Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan sampai dengan tahun (x) di bagi jumlah penduduk yang meninggal pada tahun (x) di kalikan 100%	Bidang Pencatatan Sipil	Database Kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase responden yang puas terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah responden yang menyatakan puas pada tahun (x) dibagi jumlah responden yang disurvei pada tahun (x) dikalikan 100%	Bidang Informasi dan Sekretariat	Hasil survey/ kuisisioner responden/ penerima layanan

**16. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN**

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan kualitas Infrastruktur Perkotaan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas jalan	a. Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Panjang jalan kota dalam kondisi baik / Total panjang jalan x 100%	Bidang Bina Marga	Data Base
	b. Persentase Jembatan Kota dalam Kondisi Baik	Jembatan kota dalam kondisi baik / Total jembatan kota x 100%	Bidang Bina Marga	Data Base
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air	Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik	Jumlah Drainase Kota dalam kondisi baik / Total Drainase Kota x 100%	Bidang Bina Marga	Data Base
Meningkatnya pengujian mutu bahan dan perbengkelan	Persentase produk (kegiatan) yang lolos uji mutu	Jumlah produk kegiatan yang lolos uji mutu / Jumlah total kegiatan x 100%	UPT UMBBP	Data Base

**MISI 2 : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana Dan Prasarana Permukiman, Gedung Daerah Dan Fasilitas Umum Serta Penanggulangan Bencana Kebakaran**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman	a. Prosentase Layanan Air Bersih	Jumlah KK yang mendapat Pelayanan Air bersih / Jumlah KK se-Kota Malang x 100%	Bidang Perumahan Dan Tata Ruang	Data Base
	b. Prosentase penurunan Luasan kawasan kumuh	Luasan kawasan kumuh Kota Malang tahun n dikurangi luasan kawasan kumuh n-1 dibagi luasan kawasan kumuh tahun n-1 x 100%	Bidang Perumahan Dan Tata Ruang	Data Base
Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Rata-rata tingkat waktu tanggap (response time rate)	Jumlah pengaduan yang sesuai dengan response time rate dibagi jumlah total pengaduan x 100% Penjelasan : Response time rate adalah 15 menit (sesuai spm)	UPT Pemadam Kebakaran	Laporan Kegiatan

**MISI 3 : Terwujudnya Kesesuaian Penataan Ruang Dan Bangunan**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Pelanggaran tata ruang yang tertangani / Jumlah pelanggaran tata ruang x 100 %	Bidang Penataan Dan Pengawasan Bangunan	Data Bidang

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat	Data Survei

## 17. DINAS PERHUBUNGAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Sistem Transportasi handal dan terintegrasi</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	a. Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Ruas jalan yang memenuhi standart keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yg ada x100% Penjelasan : Yang dimaksud memenuhi standar keselamatan lalu lintas yaitu yang terpasang rambu, marka, guardril dan penerangan jalan	Bidang Lalu lintas	Data Perlengkapan Lalu Lintas
	b. Persentase angkutan umum yang laik jalan	Angkutan umum yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir dikali 100 %	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Laporan Hasil Uji Kendaraan Bermotor
	c. Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun sekarang dibagi jumlah yg melanggar tahun lalu dikali 100%	Bidang Pengendalian dan Ketertiban	Laporan Pelanggaran Laik Jalan

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	d. Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun sekarang dibagi jumlah yg melanggar tahun lalu dikali 100%	Bidang Pengendalian dan Ketertiban	Laporan Pelanggaran Laik Jalan
Meningkatnya penggunaan sarana perhubungan	Tingkat utilitas terminal	Jumlah angkutan kota yang masuk terminal dibagi jumlah angkutan kota yang seharusnya masuk terminal dikali 100%	UPT Terminal	Laporan UPT Terminal
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) ttg keamanan kendaraan umum	Nilai survey kepuasan masyarakat	Sekretariat	Hasil Survey
Meningkatnya Pelayanan parkir yang tertib	a. Persentase menurunnya pelanggaran parkir dikawasan larangan parkir	Jumlah pelanggaran parkir tahun lalu dikurangi pelanggaran parkir tahun ini dibagi dengan Jumlah pelanggaran parkir tahun lalu dikali 100%	Bidang Pengendalian dan Ketertiban	Laporan Jumlah Penindakan Parkir
	b. Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib	Jumlah ruas jalan yang sdh tertib dibagi jumlah ruas jalan yang digunakan untuk parkir tepi jalan Penjelasan : Ruas jalan yang sudah tertib adalah ruas jalan yang dipakai parker yang sudah dilengkapi perlengkapan lalu lintas	Bidang Pengendalian dan Ketertiban	Laporan Pendataan Titik Parkir

## 18. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

VISI	: Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing sebagai sektor penggerak ekonomi yang berkeadilan
MISI	: Meningkatkan kinerja perdagangan dan daya saing industri

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya daya saing industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan standarisasi industri	Peningkatan PDRB Sektor industri	PDRB industri non migas atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan	Bidang Industri Agro Kimia dan Bidang Industri ILMETA & IATT	BPS
Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri	a. Persentase Peningkatan produk industri yang berstandarisasi	Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100% <b>Penjelasan :</b> Yang dimaksud dengan industri yang memiliki produk terstandarisasi adalah industri yang sudah memiliki SOP teknis	Bidang Industri Agro Kimia dan Bidang Industri ILMETA & IATT	Laporan monev Disperindag
	b. Persentase peningkatan industri yang menguasai teknologi	Jumlah industri yang menggunakan teknologi dalam proses produksi /jumlah total industri x 100% <b>Penjelasan :</b> Industri yang menggunakan teknologi dalam proses produksi adalah industri yang ≥ 50% proses produksi dilakukan secara mekanisasi		

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri	Peningkatan jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi tahun berjalan - Jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi tahun sebelumnya	Bidang Industri Agro Kimia dan Bidang Industri ILMETA & IATT	Laporan monev Disperindag
Meningkatnya inovasi industri	Persentase jumlah IKM yang melakukan inovasi produk	Jumlah industri yang melakukan inovasi produk/jumlah total industri x 100% <b>Penjelasan :</b> Yang dimaksud inovasi adalah pengembangan produk	Bidang Industri Agro Kimia dan Bidang Industri ILMETA & IATT	Laporan monev Disperindag
Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri	PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Perdagangan atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan	Bidang Perdagangan	BPS
Meningkatnya perluasan pasar dalam dan luar negeri	a. Peningkatan Nilai ekspor	Nilai ekspor bersih tahun berjalan dikurangi nilai ekspor bersih tahun sebelumnya	Bidang Perdagangan	Data realisasi ekspor
	b. Peningkatan jumlah daerah tujuan pemasaran dalam negeri	Jumlah daerah tujuan baru pemasaran dalam negeri tahun berjalan dikurangi daerah tujuan pemasaran dalam negeri tahun sebelumnya	Bidang Perdagangan	Laporan monev Disperindag
	c. Peningkatan jumlah daerah tujuan pemasaran luar negeri	Jumlah daerah tujuan baru pemasaran luar negeri tahun berjalan dikurangi Jumlah daerah tujuan baru pemasaran luar negeri tahun sebelumnya	Bidang Perdagangan	Laporan monev Disperindag



<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting lainnya	Tingkat inflasi pada tahun berjalan	Bidang Perdagangan	BPS/Bank Indonesia
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	a. Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	$\frac{\text{jumlah penyelesaian pengaduan konsumen}}{\text{jumlah pengaduan konsumen}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan Konsumen	Data sidang BPSK
	b. Persentase ketepatan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan lainnya	Jumlah ukuran barang non bdkt yang melebihi batas toleransi/jumlah barang non bdkt yang diukur ulang x 100%		Data kegiatan pos ukur

## 19. DINAS KOPERASI DAN UKM

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Koperasi dan UKM sebagai lembaga usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh dan mandiri</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi x 100 % Penjelasan : Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan koperasi tersebut pada tahun terakhir melakukan kegiatan usaha	Bidang Kelembagaan	Data Keragaan Koperasi
Meningkatnya kualitas koeprasi	Pertumbuhan koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat tahun n dikurangi jumlah koperasi sehat tahun n-1 dibagi jumlah koperasi sehat tahun n-1 X 100% Penjelasan : Kriteria koperasi sehat ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku.	Bidang Usaha dan Pembiayaan	Data hasil penilaian kesehatan Koperasi

<b>MISI 2</b>	<b>: Memberdayakan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing</b>
---------------	--

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Tumbuhnya wirausaha baru (WUB)	Pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru tahun n dikurangi jumlah wirausaha baru tahun n-1 dibagi jumlah wirausaha baru tahun n-1 X 100%	Bidang UKM	Data Keragaan Usaha Kecil Menengah

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Penjelasan : Kriteria Wirausaha Baru : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha yang dapat memproduksi barang/jasa sendiri;</li> <li>- Mampu memasarkan barang/jasanya;</li> <li>- Dapat membuat laporan keuangan.</li> </ul>		

## 20. DINAS PASAR

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan dan pengelolaan Pasar yang Profesional</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan Pengelolaan Pasar dan penataan PKL yang lebih Profesional</b>

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Peningkatan pengelolaan Pasar dan Penataan PKL yang lebih profesional	a. Prosentase PKL yang ditata dan direlokasi sesuai komoditas	Jumlah PKL yang ditata dan direlokasi sesuai komoditas <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan PKL Kota Malang X 100%	Bidang Pengendalian dan Penertiban PKL	Dinas pasar
	b. Presentase Revitalisasi Pasar	Jumlah pasar tradisiona yang memenuhi standart <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan pasar tradisional X 100%	Bidang Pemeliharaan	Dinas pasar
Meningkatnya pelayanan pasar tradisional	Survey Kepuasan Pedagang Pasar Tradisional	Nilai SKM	Sekretariat	Dinas pasar

## 21. DINAS PENDAPATAN DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	a. Capaian Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi Pajak Daerah}}{\text{target Pajak Daerah}} \times 100 \%$	Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi	Data Realisasi Pajak Daerah
	b. Persentase Peningkatan Pajak Daerah	$\frac{\text{Penerimaan pajak daerah tahun (x)} - \text{penerimaan pajak daerah tahun (x-1)}}{\text{penerimaan pajak daerah tahun (x-1)}} \times 100 \%$	Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi	Data Realisasi Pajak Daerah
	c. Persentase Penurunan tunggakan Pajak Daerah	$\frac{\text{Tunggakan pajak daerah tahun (x-1)} - \text{tunggakan pajak daerah tahun (x)}}{\text{tunggakan pajak daerah tahun (x-1)}} \times 100 \%$	Bidang Penagihan	Data Base Tunggakan Pajak Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	Sekretariat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah	Rasio biaya terhadap pendapatan Pajak Daerah	$\frac{\text{Total jumlah belanja}}{\text{Jumlah penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$	Sekretariat	Data Laporan Keuangan

## 22. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Kota Malang yang Bersih, Hijau dan Nyaman</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampah sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah	a. Persentase pengurangan sampah melalui 3R	Volume sampah yang berkurang (3R) dibagi Volume timbulan sampah se Kota Malang x 100%	UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	Laporan Kegiatan
	b. Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA	Volume sampah yang terangkut ke TPA dibagi Volume timbulan sampah se Kota Malang x 100%	Bidang Kebersihan	Laporan Kegiatan
Meningkatnya kualitas sanitasi persampahan permukiman perkotaan	a. Persentase penduduk yang dilayani pengangkutan sampah	Jumlah penduduk yang dilayani keg.pengangkutan sampah (jiwa) dibagi Total Jumlah penduduk perkotaan x 100%	Bidang Kebersihan	Laporan Kegiatan
	b. Persentase pengoperasian TPA	A +B + C  A = koefisien TPA x 40% B = Koefisien kualitas pengolahan lindi x 40% C = Koefisien Penanganan gas x 20%	UPT Tempat Pemrosesan Akhir	Laporan Kegiatan
Terwujudnya kualitas sanitasi lingkungan pada kawasan permukiman	Persentase masyarakat yang memiliki sanitasi	Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi dibagi Jumlah penduduk se Kota Malang x 100%	UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	Laporan Kegiatan

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas sanitasi air limbah pemukiman perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Jumlah penduduk (jiwa) yang terlayani tangki septik/ MCK dibagi Total Jumlah penduduk kota (jiwa ) x 100%	UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	Laporan Kegiatan

**MISI 2 : Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Persentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Luas RTH publik (Ha) dibagi Total luas kota (Ha) x 100% Penjelasan : RTH publik minimal 20% dari seluruh luas wilayah Kota	Bidang Pertamanan	Data Luasan RTH
Meningkatnya pelayanan pemakaman	a. Persentase masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap pelayanan pemakaman	Masyarakat yang puas pelayanan pemakaman di DKP dibagi Ahli waris yang mengajukan pemakaman di DKP x 100%	Bidang Pemakaman	Hasil Survey pada masyarakat (ahliwaris)
	b. Persentase peningkatan luasan lahan makam	Jumlah luasan lahan makam tahun n dikurangi jumlah luasan lahan makam tahun n-1 dibagi luasan lahan makam tahun n-1 x 100%	Bidang Pemakaman	Data lahan makam

**MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan	Persentase Fasilitas Penerangan Jalan	Jumlah PJU terpasang dibagi Total panjang jalan pada jalan kota/jarak antar tiang x 100%	Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota	Data Penerangan Jalan Umum
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kebersihan dan Pertamanan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

### 23. DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

**VISI : Terwujudnya tenaga kerja yang kompetitif, sukses transmigrasi, terjalinnya hubungan industrial yang harmonis, dan perlindungan tenaga kerja menuju pelayanan yang prima**

**MISI 1 : Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktifitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing dan memperluas kesempatan kerja**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja	a. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang di latih <b>dibagi</b> jumlah pendaftara pelatihan berbasis kompetensi <b>dikali</b> 100%	Bidang pelatihan dan penempatan	Laporan kegiatan pelatihan kompetensi yang dilaksanakan Disnakertrans

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	b. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang telah <b>di bagi</b> jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan <b>dikali</b> 100%	Bidang pelatihan dan penempatan	Laporan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan Disnakertans
	c. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan <b>dibagi</b> jumlah pencari kerja yang terdaftar <b>dikali</b> 100%	Bidang pelatihan dan penempatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan indeks penempatan kerja (IPK)</li> <li>b. Laporan penempatan tenaga kerja dari kantor perwakilan penempatan tenaga kerja, perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan lowongan kerja, perusahaan pemberi kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja dan bursa kerja khusus</li> </ul>



KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	d. Rasio penduduk yang bekerja	Jumlah tenaga kerja yang bekerja <b>dibagi</b> jumlah angkatan kerja	Bidang pelatihan dan penempatan	a. Data dari BPS b. Laporan jumlah pengangguran dari Disnakertrans
	e. Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDA/PMDN <b>dibagi</b> jumlah seluruh PMA dan PMDN	Bidang pengawasan	Laporan wajib lapor ketenagakerjaan dari perusahaan
	f. Angka partisipasi angkatan kerja	Angkatan kerja 15 tahun ke atas <b>dibagi</b> jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100%	Bidang pelatihan dan penempatan	a. Data dari BPS b. Laporan jumlah pengangguran dari Disnakertrans
	g. Presentase tingkat pengangguran terbuka	Jumlah angkatan kerja yang menganggur (tidak bekerja) <b>dibagi</b> jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas <b>dikali</b> 100%	Bidang pelatihan dan penempatan	a. Data dari BPS b. Laporan jumlah pengangguran dari Disnakertrans

**MISI 2 : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan ketengangan dalam bekerja, serta meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan harmonis	a. Persentase pemeriksaan perusahaan	Jumlah perusahaan yang di periksa <b>dibagi</b> jumlah perusahaan yang terdaftar <b>dikali</b> 100%	Bidang pengawasan	Laporan hasil pemeriksaan perusahaan
	b. Persentase pengujian peralatan di perusahaan	Jumlah persalatan yang di uji <b>dibagi</b> jumlah peralatan yang terdaftar <b>dikali</b> 100%	Bidang pengawasan	Laporan hasil pengujian peralatan K3
	c. Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan social ketenagakerjaan	Jumlah pekerja/buruh peserta program jaminan social ketenagakerjaan <b>dibagi</b> jumlah pekerja/buruh <b>dikali</b> 100%	Bidang pengawasan	Laporan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan
	d. Persentase kasus yang di selesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) <b>dibagi</b> jumlah kasus yang di daftarkan <b>dikali</b> 100%	Bidang hubungan industrial	Laporan pendaftaran dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

## 24. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

<b>VISI</b>	: Terwujudnya Kota Malang Informatif
<b>MISI 1</b>	: Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan komunikasi

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan telekomunikasi	a. Persentase penyelesaian pengaduan materi SMS pengguna nomor telekomunikasi dalam rangka perlindungan masyarakat	Jumlah pengaduan yang terselesaikan di bagi jumlah pengaduan keseluruhan X 100%	Bidang Informasi Publik	Website Kota Malang
	b. Persentase peningkatan pengunjung website per tahun	Jumlah pengunjung website tahun n dikurangi pengunjung website tahun n-1 dibanding jumlah pengunjung website tahun n-1 x 100%	Bidang Informasi Publik	Website Kota Malang
	c. Persentase luas area blank spot	Luas area blank spot dibagi luas wilayah x 100%	Bidang Pos dan Telekomunikasi	Laporan hasil surve area blank spot
Meningkatnya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Persentase informasi yang di sebarakan melalui KIM	Jumlah informasi yang di sebarakan melalui KIM di bandingkan jumlah seluruh informasi melalui (KIM,WEBSITE, Media Lainnya) x 100%	Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi	KIM (kelompok Informasi Masyarakat )

**MISI 2** : Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan Informatika

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan informatika	a. Persentase simda yang terintegrasi	Jumlah SIMDA yang telah diintegrasikan di bandingkan seluruh SIMDA x 100%	Bidang Aptel	Jumlah SIMDA
	b. Nilai Survei kepuasan Masyarakat	Survei kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat	Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

## 25. DINAS SOSIAL

**VISI** : Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera dan Bermartabat

**MISI 1** : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS	a. Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang telah mendapat bantuan <b>dibagi</b> PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya mendapat bantuan x 100%	Bidang Rehabilitasi Sosial	Laporan Hasil Kegiatan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang telah mendapat bantuan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	b. Prosentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial <b>dibagi</b> Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial Yang seharusnya menerima jaminan Sosial x 100 %		Laporan Hasil Kegiatan Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
	c. Prosentase masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial	masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial <b>dibagi</b> masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang seharusnya memperoleh bantuan sosial _____ x 100%	Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial	Laporan Hasil Kegiatan Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Meningkatnya kualitas dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase ( % ) PMKS yang mendapat bantuan dan Perlindungan sosial	PMKS yang mendapat bantuan dan Perlindungan sosial <b>dibagi</b> PMKS yang seharusnya mendapat bantuan dan Perlindungan sosial x 100%	Bidang Bantuan Dan Perlindungan Sosial	Laporan Hasil Kegiatan PMKS yang mendapat bantuan dan Perlindungan sosial

**MISI 2 : Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya peranserta, pola kemitraan dan nilai – nilai kesetiakawanan lembaga dan/atau perorangan dalam penyelenggaraan sosial	a. Prosentase masyarakat yang memanfaatkan LBK Pandan wangi dari PMKS Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	masyarakat yang memanfaatkan LBK Pandan wangi dari PMKS Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yg mendapat Pelatihan <b>dibagi</b> masyarakat yang memanfaatkan LBK Pandan wangi dari PMKS Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang seharusnya mendapat Pelatihan_x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Laporan Bulanan
	b. Prosentase masyarakat yang memanfaatkan Barak Sukun	masyarakat yang memanfaatkan Barak Sukun yang telah menempati TWK SUKUN <b>dibagi</b> masyarakat yang seharusnya memanfaatkan Barak Sukun x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Laporan Bulanan
	c. Prosentase Perawatan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Veteran dan Taman Makam Pahlawan TRIP	Lamanya Perawatan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Veteran dan Taman Makam Pahlawan TRIP <b>dibagi</b> Lamanya Perawatan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Veteran dan Taman Makam Pahlawan TRIP Perawatan dan Pemeliharaan seharusnya di lakukan x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Laporan Bulanan

## 26. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

<b>VISI</b>	<b>: Mengembangkan dan Melestarikan Kebudayaan, nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan peninggalan purbakala sebagai media untuk mempererat persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Menjadikan nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan peninggalan purbakala sebagai aset guna kepentingan pembelajaran</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan kepurbakalaan sebagai warisan luhur budaya	a. Persentase Objek cagar budaya yang terawat	Jumlah cagar budaya yang terawat dibagi jumlah seluruh cagar budaya x 100%	Bidang Sejarah dan Nilai Tradisi	Dokumen Inventarisasi Benda Cagar Budaya
	b. Persentase tradisi dan adat istiadat budaya yang terjaga	Jumlah tradisi dan adat istiadat budaya yang terjaga dibagi jumlah seluruh adat istiadat budaya x 100%	Bidang Kesenian	Hasil Monitoring Bidang Kesenian
Meningkatnya seni budaya dan tradisi Kota Malang yang dikenal masyarakat	Persentase kelompok kebudayaan yang masih aktif yang dibina	Jumlah Kelompok kebudayaan yang telah menerima pembinaan dibagi jumlah seluruh kelompok kebudayaan yang masih aktif x 100%	Bidang Kesenian	Hasil Monitoring Bidang Kesenian

**MISI 2 : Mengembangkan, mempromosikan dan menjadikan pariwisata Kota Malang menjadi destinasi pariwisata unggulan**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terciptanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara ke Kota Malang	Jumlah kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara ke Kota Malang	Bidang Pengembangan Produk Promosi Wisata	Hasil Monitoring Bidang Pengembangan Produk Promosi Wisata

## 27. DINAS PERTANIAN

**VISI : Terwujudnya Pembangunan Pertanias Berwawasan Agribisnis**

**MISI 1 : Meningkatkan swasembada pangan yang berkelanjutan**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan ketersediaan pangan utama (food avability)	Ketersediaan pangan utama (food avability)	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg) dibagi Jumlah penduduk x 100%	Bidang Tanaman	Database Dinas Pertanian
Peningkatan produktifitas lahan dengan penerapan GAP (Good Agricultural Practice)	Peningkatan produktifitas hasil pertanian	Peningkatan produktifitas sebesar 3,3% per tahun	Bidang Tanaman	Database Dinas Pertanian



**MISI 2 : Mengoptimalkan pengelolaan usaha pertanian**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan manajemen lembaga tani dan usaha kemitraan	presentase pengusaha kecil bidang pertanian yang sudah terjalin kemitraan	jumlah pengusaha kecil bidang pertanian yang sudah terjalin kemitraan dibagi jumlah seluruh pengusaha kecil bidang pertanian x 100%	Bidang Binus	Database Dinas Pertanian
Meningkatnya kualitas pelayanan pertanian	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat	Hasil Survey Kepuasan masyarakat

**28. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**VISI : Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berintegritas**

**MISI 1 : Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Jumlah Polisi Pamong Praja X 10.000 <b>dibagi</b> jumlah penduduk	Bidang Sumber Daya Aparatur	- Data Personil SatpolPP - Data Kependudukan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah kelompok patroli dikalikan 3 patroli dalam sehari <b>dibagi</b> jumlah kecamatan	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Data regu patroli
	Prosentase pelanggaran Perda yang di tindak	Jumlah pelanggaran Perda yang ditindak <b>dibagi</b> jumlah pelanggaran perda <b>dikali</b> 100%	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Data pelanggaran perda
Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	Hasil SKM

**MISI 2 : Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat**

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	a. Prosentase tindak kriminalitas yang tertangani	Jumlah tindak kriminal tertangani <b>dibagi</b> jumlah tindak kriminal <b>dikali</b> 100%	Bidang Perlindungan Masyarakat	Data tindak kriminal
	b. Rasio Pos Kamling per 100 KK	Jumlah Pos Kamling x 100 <b>dibagi</b> jumlah keseluruhan Kepala Keluarga	Bidang Perlindungan Masyarakat	- Data Pos Kamling - Data Kependudukan - Monografi Kelurahan

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
	c. Rasio Petugas Linmas per RT	Jumlah satuan linmas <b>dibagi</b> jumlah Rukun Tetangga (RT)	Bidang Perlindungan Masyarakat	– Data Personil Satlinmas – Monografi Kelurahan

## 29. KANTOR KETAHANAN PANGAN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pemantapan Ketahanan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Produktivitas Pemantapan Ketahanan Pangan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketersediaan pangan utama (food availability)	a. Ketersediaan energy dan protein per kapita	Ketersediaan pangan perkapita perhari dibagi 100 dikali kandungan kalori dikali Bahan Makanan Dapat Dimakan  Penjelasan : - Ketersediaan energy per kapita adalah Sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk Kota Malang dalam satu Tahun	Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	BPS, Bulog, Dinas Pertanian , Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pasar, BKBPM, Dinas Kesehatan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		- Ketersediaan protein per kapita adalah Sejumlah suatu persenyawaan yang mengandung unsur "N", sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk Kota Malang dalam satu Tahun		
	b. Penguatan cadangan pangan	Jumlah Cadangan Pangan Kota Malang dibagi 100 Ton dikali 100 persen  Penjelasan : Penguatan Cadangan Pangan adalah Peningkatan Cadangan Pangan Kota	Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	BPS, Bulog, Dinas Pertanian Kota Malang
	c. Skor pola pangan harapan (PPH)	<p>Nilai capaian peningkatan = <math>\% \text{ AKG} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan}</math></p> <p>Energi masing-masing komoditas dibagi angka kecukupan gizi dikali 100 persen</p>	Kasi Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Neraca Bahan Makanan Kota Malang

### 30. KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Menjadikan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang terdepan dalam pembelajaran non formal serta menjadikan arsip sebagai keutuhan informasi</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: Meningkatkan minat baca dan mengembangkan koleksi bahan pustaka</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya minat baca dan jumlah kunjungan perpustakaan	Prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 x 100%	Seksi layanan dan Informasi	Statistik Pengunjung
Meningkatkan sistem tertib administrasi dan pengembangan SDM Kearsipan	Prosentase peningkatan dokumen arsip yang terolah	Jumlah dokumen arsip yang terolah tahun n dikurangi jumlah dokumen arsip yang terolah tahun n-1 dibagi jumlah dokumen arsip yang terolah tahun n-1 x 100%	Seksi Akuisisi, Deposit dan Pengolahan	Data Arsip
Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum dan arsip daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pengukuran SKM	Sub Bagian Tata Usaha	Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

### 31. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

<b>VISI</b>	<b>: Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan KORPRI yang Berkualitas</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan kinerja Dewan Pengurus KORPRI Kota Malang</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan KORPRI	Kualitas nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	Kepala Subbag Umum	Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

### 32. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermartabat</b>
<b>MISI</b>	<b>: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Cepat, Tepat dan Terjangkau</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya efisiensi dan mutu pelayanan Rumah Sakit	Persentase Net Death Rate (NDR)	$\text{NDR} = \frac{\sum \text{Pasien keluar mati} \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (Hidup+mati)}}$	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Medis Dan Perawatan	Rekam Medik RS

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Rumah sakit daerah	Nilai survey kepuasan karyawan	Pengukuran SKM	Kepala Subbagian Tata Usaha	Data SKM

### 33. KECAMATAN KLOJEN

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Adil, Profesional dan Akuntabel</b>
<b>MISI</b>	<b>: Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan	a. Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100%	Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan
	b. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas musrenbang Wiliayah di Kecamatan	Prosentase kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANGKEL sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh kelurahan x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase pos kamling di wilayah kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya	Jumlah pos kamling aktif dibagi jumlah seluruh pos kamling x 100 % Penjelasan : Yang dimaksud Pos Kamling Aktif adalah Pos Kamling yang melaksanakan ronda/piket minimal 1 kali seminggu.	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Monitoring Trantib
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif	Jumlah organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi sosial tingkat kecamatan x 100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahunan Organisasi Sosial Kemasyarakatan



### 34. KECAMATAN LOWOKWARU

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya pelayanan prima yang akuntabel dan bermartabat</b>
<b>MISI</b>	<b>: Mewujudkan pelayanan publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Bermartabat</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan	a. Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100%	Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan
	b. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas musrenbang Wiliayah di Kecamatan	Prosentase kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANGKEL sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh kelurahan x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase pos kamling di wilayah kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya	Jumlah pos kamling aktif dibagi jumlah seluruh pos kamling x 100 % Penjelasan : Yang dimaksud Pos Kamling Aktif adalah Pos Kamling yang melaksanakan ronda/piket minimal 1 kali seminggu.	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Monitoring Trantib

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif	Jumlah organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi sosial tingkat kecamatan x 100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahunan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

### 35. KECAMATAN BLIMBING

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Kecamatan Blimbing Yang Bermartabat</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik secara Profesional dan Akuntabel</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan	a. Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100%	Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan
	b. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas musrenbang Wiliayah di Kecamatan	Prosentase kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANGKEL sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh kelurahan x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase pos kamling di wilayah kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya	Jumlah pos kamling aktif dibagi jumlah seluruh pos kamling x 100 % Penjelasan : Yang dimaksud Pos Kamling Aktif adalah Pos Kamling yang melaksanakan ronda/piket minimal 1 kali seminggu.	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Monitoring Trantib
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif	Jumlah organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi sosial tingkat kecamatan x 100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahunan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

### 36. KECAMATAN KEDUNGKANDANG

<b>VISI</b>	<b>: TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA .</b>
<b>MISI 1</b>	<b>: MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan	a. Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100%	Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan
	b. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas musrenbang Wiliayah di Kecamatan	Prosentase kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANGKEL sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh kelurahan x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase pos kamling di wilayah kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya	Jumlah pos kamling aktif dibagi jumlah seluruh pos kamling x 100 % Penjelasan : Yang dimaksud Pos Kamling Aktif adalah Pos Kamling yang melaksanakan ronda/piket minimal 1 kali seminggu.	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Monitoring Trantib

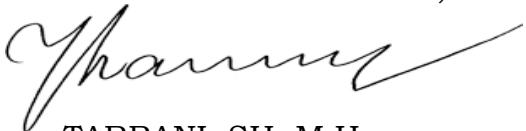
<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif	Jumlah organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi sosial tingkat kecamatan x 100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahunan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

### 37.KECAMATAN SUKUN

<b>VISI</b>	<b>: TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG AKUNTABEL</b>
<b>MISI</b>	<b>: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel</b>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan	a. Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100%	Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan
	b. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas musrenbang Wiliayah di Kecamatan	Prosentase kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANGKEL sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh kelurahan x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase pos kamling di wilayah kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya	Jumlah pos kamling aktif dibagi jumlah seluruh pos kamling x 100 % Penjelasan : Yang dimaksud Pos Kamling Aktif adalah Pos Kamling yang melaksanakan ronda/piket minimal 1 kali seminggu.	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Monitoring Trantib
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif	Jumlah organisasi sosial tingkat kecamatan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi sosial tingkat kecamatan x 100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahunan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON